

**DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM MEMPERCEPAT
PERKEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN
MENUJU MASYARAKAT LIMA TITIK NOL (5.0)**

DISERTASI

Oleh

**LA ODE MBUNAI
2107190003**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM MEMPERCEPAT
PERKEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN
MENUJU MASYARAKAT LIMA TITIK NOL (5.0)**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**LA ODE MBUNAI
2107190003**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Mbunai
NIM : 2107190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM MEMPERCEPAT PERKEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN MENUJU MASYARAKAT LIMA TITIK NOL (5.0)”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 03 Mei 2024



La Ode Mbunai
NIM: 2107190003



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM MEMPERCEPAT
PERKEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN
MENUJU MASYARAKAT LIMA TITIK NOL (5.0)**

Oleh:

Nama : La Ode Mbunai
NIM : 2107190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 03 Mei 2024

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

NIP/NIDN: 191690/9990463325

Co Promotor I

Co Promotor II

Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

NIP/NIDN: 091692/0326106005

Dr. Aartje Tehupeory, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 981456/0314086404



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 03 Mei 2024 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : La Ode Mbunai
NIM : 2107190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S. H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H.	Penguji	3.
4	Prof. Dr. M. L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	4.
5	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., Ph.D.	Penguji Eksternal	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI
UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM MEMPERCEPAT
PERKEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN
MENUJU MASYARAKAT LIMA TITIK NOL (5.0)**

Nama : La Ode Mbunai
NIM : 2107190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 03 Mei 2024

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.

NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : La Ode Mbunai
NIM : 2107190003
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM MEMPERCEPAT PERKEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN MENUJU MASYARAKAT LIMA TITIK NOL (5.0)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 03 Mei 2024



La Ode Mbunai
NIM: 2107190003



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**



**Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 0412/UKI.PPS/HKP.03.01/2024

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

- Menimbang** :
- bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
 - bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
 - bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 - Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKLR/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2024

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Naidak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAL, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0412/UKLPPS/HKP.03.01/2024
Tanggal : 30 April 2024



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Jumat, 03 Mei 2024	13.30 - 15.30 WIB	La Ode Mbunai NIM. 2107190003	DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM MEMPERCEPAT PERKEMBANGAN INVESTASI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN MENUJU MASYARAKAT LIMA TITIK NOL (5.0)	1. Prof. Dr. Dhamiswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Dr. Aartje Tehuetoory, S.H., M.H. 4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. 5. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. 6. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum. 7. Prof. Ir. Roy HM. Sembel, MM., P.hD.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,P.A.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402



Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP./NIDK.: 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
Penguji : Baju Toga lengkap
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan hidayah-Nya, limpahan rezeki dan kesehatan, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, beserta seluruh keluarganya, serta sahabatnya. Desertasi ini berjudul "Rekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0)". Dalam penyusunan Desertasi ini banyak hambatan dan tantangan yang penulis dapatkan, namun atas bantuan dan bimbingan serta motivasi yang tiada henti, disertai harapan yang optimis dan tekad yang kuat sehingga penulis dapat mengatasi semua itu.

Ucapan Terima kasih. Dan penghormatan serta penghargaan yang teramat sangat untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda La Ode Madu dan Ibunda Wa Ode Maliana, yang telah susah payah melahirkan, membesarkan dengan seluruh cinta dan kasih sayangnya, juga atas doa, serta bantuan materi kepada penulis dalam menyelesaikan studi Doktor ini.

Selanjutnya Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak, Prof. Dr. John Pieris, SH., MH., MS selaku Promotor, dan Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan juga Ko-Promotor I; serta Ibu Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH, selaku Ko- Promotor II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, nasehat dan motifasi yang sangat berharga

kepada penulis sehingga bantuan-demi bantuan mereka yang pada akhirnya penulisan desertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak Edward Sirait, M.M., selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Desi Sianipar, M.Th., D.Th, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana, Universitas

Kristen Indonesia.

5. Bapak Prof. Dr. John Pieris, SH., MH., MS, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
6. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum, dan Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, selaku tim penguji pada Ujian Tutup desertasi penulis dan yang telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk terselesaikannya Disertasi ini.

Seluruh Dosen dan Staf Akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI), khususnya:

- Bapak Prof. Dr. John Pieris, SH., MH., MS, bapak ketua prodi Doktor dan mentor serta orang yang selalu memberikan solusi dan kemudahan kepada penulis dan ketika penulis mulai kehilangan arah bapak Prof selalu memberikan semangat itu, terimakasih prof.
 - Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SH, MH, bapak wakil Rektor III Universitas Kristen Indonesia, orang yang sederhana dan rendah hati dan serta memberikan solusi dan bantuan pemikiran serta memberikan jalan kepada kami dan saya pribadi dalam mempermudah penyelesaian studi dan memberikan semangat yang luar biasa, semoga bapak sehat dan sukses selalu.
 - Ibu Dr. Aartje Tehupeior, SH., MH, pakar hukum pertanahan Universitas Kristen Indonesia dan orang yang sangat berjasa memberikan semangat, motivasi dan materi bahkan seperti orang tua kandung serta siang dan malam selalu menanyakan perkembangan penulisan dan kesehatan penulis, terimakasih ibu jasa dan serta Ibu sehat dan segera mencapai penganugerahan Guru Besarnya.
 - Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH, MH ibu dosen yang sangat luar biasa memberikan semangat dan selalu ramah dalam memberikan arahan kepada penulis, semoga ibu sehat dan sukses selalu.
 - Mas Brian dan Ibu Kety yang sangat luar biasa banyak membantu penulis dalam studi dan lainnya dalam mengurus penyelesaian studi penulis serta yang tidak penulis sebutkan satu persatu Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
1. Ucapan terimah kasih juga kepada keluarga besarku yang telah membimbing dari awal masuk hingga akhir. Saudara-saudaraku: Ratna Mustika, Sitti Herni, S.Kep, La Ode Ali Said, S.P, La Ode Idul, Diana Papilaya, A.Md., Keb, Fitra Rahmadani S.H, Paman, Bibi dan Ipar yang tak lupa juga saya mengucapkan terimakasih atas bantuanya. Ld. Arwah Malino, S,Sos, La Uri, Sumiati, S.P, Ld Sarmadan Pandu, S.Si serta keponakan- keponakanku, Kelvin, Fitri, Nisa, Ainun, Nafisa, Hafis, Najwa, Auzu, Acil dan Nindia.

2. Untukmu kupersembakakan karya ini Epi Novia S.K.M, Orang yang Spesial dan sangat memberikan bantuan semangatnya sehingga saya penulis bisa menyelesaikan Studi ini.
3. Ucapan Terimakasih Khusus Kepada Bapak/Ibu Donatur yang membantu, Bapak. Ciong Boeng, Ibu Farida dan Ibu Frinda Susanto Serta Ibu Suminah yang telah membantu keuangan dan kelengkapan ujian penulis.
4. Ucapan terimah kasih juga kepada Teman-Teman seperjuangan Kelas Doktoral Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak memberikan semangat dan kerjasama yang luar biasa sehingga perjuangan untuk menyelesaikan desertasi ini terasa ringan.
5. Seluruh Pimpinan, senior Dosen dan sahabat tenaga pengajar serta staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ucapan terimah kasih juga kepada teman-teman Kantor Semesta & Partners Law Firm, Kantor Wetmen Sinaga & Rekan dan Kantor PT. Okto Halawa & Rekan, serta lainnya yg nga bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Seluruh Pimpinan, senior Dosen dan sahabat Tenaga Ahli Yayasan Ekolikum Institute dan PT. Lentera Timur., sahabat Tamzil Syuhada, Ibnu, Galang, Iksan, Husran dan Kasim.

Dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, harapan kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun serta memperbaiki demi kesempurnaan Desertasi ini untuk menjadi bacaan yang baik dan bermanfaat. Amin.

Jakarta, 3 Mei, 2024

Penulis;

LA ODE MBUNAI 2107190003

DAFTAR ISI

Lembar Sampul	ii
Lembar Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Lembaran Pesetujuan Promotor	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Moto dan Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identitas Masalah	15
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Kegunaan Penelitian	18
E. 1. Kegunaan Teoritis	18
E. 2. Kegunaan Praktis	18
F. Kerangka Teori/Konsep	20
F. 1. Kerangka Teori	20
F.2. Kerangka Konsep	39
G. Metode Penelitian	41
G. 1. Pendekatan Penelitian	43
G. 2. Spesifikasi Penelitian	45
G. 3. Jenis Dan Sumber Data	47
G. 4. Teknik Pengumpulan Data	48
G. 5. Teknik Analisis Data	50

G. 6. Lokasi Penelitian	51
G. 7. Orisinalitas Penelitian	51
H. Sistematika Penulisan	54
BAB II Dasar Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Menciptakan Pempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0)	
A. PERTAMBANGAN	56
A.1. Pengertian Pertambangan	59
A.1.1 Pengertian Hukum Pertambangan	61
A.1.2 Sifat Publik Dari Hukum Pertambangan (Tinjauan Sejarah)	62
A.1.3 Kedudukan Hukum Pertambangan Dalam Hukum Positif ..	64
A.2. Jenis-Jenis Pertambangan	65
A.3. Syarat Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan	68
A.4. Pengelolaan Pertambangan Nikel	74
A.5. Penegakan Dan Sangsi Terhadap Pemilik Izin Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Hukum	79
A.5.1. Penegakan Hukum terhadap Aktivitas usaha Pertambangan Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	84
A.5.2. Sangsi Hukum Pemilik Izin Usaha Pertamban	95
B. Pengertian Investasi Dan Sejarah Investasi	126
B.1. Pengertian Investasi	126
B.2. Sejarah Investasi di Indonesia	133
B.2.1. Periode Kolonial Kuno	133
B.2.2. Periode Imperialisme Baru	133
B.2.3. Periode Investasi Tahun 1960-An	134
B.2.4. Periode Awal Kemerdekaan (1945-1965)	134
B.2.5. Periode Orde Baru	135
B.2.6. Periode Orde Revormasi	135

B.3. Jenis-Jenis Investasi	137
C. Dasar Hukum Dan Asas-Asas Investasi.....	146
C.1. Dasar Sumber-Sumber Hukum Investasi	146
C.2. Asas-Asas Hukum Investasi	150
D. Dekonstruksi Hukum	153
D.1. Konsep Hilirisasi	160
D.2. Kebijakan Ekspor Dan Dampak Penghentian Ekspor	165
D.2.1 Keuntungan Negara	170
D.2.2 .Dampak Negara Akan Gugatan Uni Eropa (UE) Ke World Trade Organization (WTO) Terkait Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia	176
E. Analisis Dan Teori	188
BAB III Regulasi Kebijakan Investasi Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Memberikan Kepastian Hukum	195
A. Peran Pemerintah dalam meningkatkan Investasi Dan Pelaksanaanya dengan penerapan Perundangan-Undangan	195
A.1 Bentuk Kerjasama Investasi Indonesia Terhadap Negara- Negara Investasi	201
A.2 Manfaat Bagi Negara dan Khususnya Masyarakat Sulawesi	210
B. Pengaturan Hukum Terhadap Investasi di Sektor Pertambangan Mineral Nikel dan Batu-Bara	219
B.1 Pengaturan Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	228
B.2 Implikasi Dekonstruksi Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral Nikel dan Batubara Terhadap Iklim Investasi di Indonesia	245
B.3 Urgensi Perubahan Undang Nomor 4 Tahun 2009 Digantikan Dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara	264

C.	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel dan Batu-bara	270
C.1	Kepastian Hukum Terhadap Investor	275
C.2	Perkembangan Investasi dan Pengaturan Hukum di Sektor Industri Pertambangan Mineral Nikel dan Batubara Di Indonesia	299
D.	Analisis Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Dekonstruksi Hukum investasi pada sektor pertambangan mineral dan batubara dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat	305
D.1	Relevansi Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Penanaman Modal terhadap Investasi Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara	312
D.2	Dasar Penerapan Dekonstruksi dalam Sejarah Investasi Asing dibidang Pertambangan Indonesia	327
E.	Analisis Dan Teori	330
BAB IV	Peran Pemerintah Dalam Memberikan Kemudahan Dan Kontrak Kerjasama Terhadap Pengusaha Pertambangan	338
A.	Peran Pemerintah Terhadap Peningkatan Investasi di Sektor Pertambangan	338
A.1	Konsep Dekonstruksi Terhadap Pengaturan Investasi dan Pertambangan Mineral dan Batu-Bara di Indonesia	351
A.2	Dekonstruksi Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara	365
B.	Penerapan Konsep Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Minerba	384
C.	Kepastian Regulasi Investasi Melalui Omnibus Law Dalam Upaya Perbaikan iklim Investasi di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	391
D.	Analisis Dan Teori	391

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	409
B.	Saran	416
DAFTAR PUSTAKA.....		419



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Nilai Ekspor Nikel Indonesia Dan Nikel Dunia Sumber Uncomtrade	76
Tabel 1.2	IPU Ekplorasi Dan IUP Oprasi Produksi	92
Tabel 1.3	Kewajiban Pemegang IUP	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Realisasi Investasi Tahun 2022	142
Gambar 1.2	Kontribusi PMDN Dan PMA Tahun 2022	143
Gambar 1.3	Realisasi Investasi PMDN Dan PMA Tahun 2022	144
Gambar 1.4	Sektor Investasi Tahun 2022	145



ABSTRAK

Judul Disertasi: Dekonstruksi Kebijakan Dan Kepastian Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Investor Dalam Mempercepat Perkembangan Investasi Pada Sektor Pertambangan Menuju Masyarakat Lima Titik Nol (5.0).

Kata Kunci: Kegiatan Investasi pada sektor pertambangan perlu dilakukan Dekonstruksi agar pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan baik dari aspek materi hukum, kelembagaan dan aparatur, pelayanan hukum maupun budaya hukum masyarakat dapat memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan investor dalam menciptakan pemercepat perkembangan investasi pada sektor pertambangan menuju masyarakat lima titik nol (5.0), kemudian aktivitas investasi pada sektor pertambangan yang pada pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selanjutnya disebut dengan UU Minerba, yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara dirasa masih kurang efektif memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil.

ABSTRACT

Dissertation Title: Policy Deconstruction and Legal Certainty as an Effort to Protect Investors in Accelerating Investment Development in the Mining Sector towards a Five Point Zero Society (5.0).

Keywords: Investment activities in the mining sector need to be deconstructed so that the management of natural resources, especially mining, both from the aspects of legal material, institutions and apparatus, legal services and community legal culture can provide legal certainty as an effort to protect investors in creating accelerated investment development in the sector mining towards the five zero point (5.0) community, then investment activities in the mining sector which in implementation are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, hereinafter referred to as the Law Minerba, which can provide a legal basis for steps to reform and reorganize mineral and coal mining management and exploitation activities, is still deemed to be less effective in providing legal certainty and fair legal protection.